

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI WILAYAH APEC (Kajian Kesiapan Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas)

Oleh:

Oke Setiarso¹⁾, Nurul Anwar²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

SUMMARY

Theme of this research is around the ability of human resource development to Asia Pacific countries. Main problems on this research are how the comparison of human development among the countries and what variables that influence it.

The economic, demographic, public health and education term have significant impact to human developing index in APEC area. Gross Domestic Product per capita, access to proper water, and expenditure of education have positive impact to HDI. Otherwise, total populations, population with HIV/AIDS, female life expectancy of birth, and inflation factor have negative impact to HDI.

According to this research, first, the education sector has high contribution to the capacity of human development. Government should allocate more budgets spending to the sector. Second, highly infant mortality and low of female life expectancy of birth show that public health aspect no being measure of the success of human development target. Developing of this sector must be main priority. Third, government has to implement sustainability development process that use environmental sight. It is relevant to the efforts of giving public service, especially well sanitation and sufficient of purification water to all Indonesian civil.

Keywords: *human development, inflantion, female life expectancy*

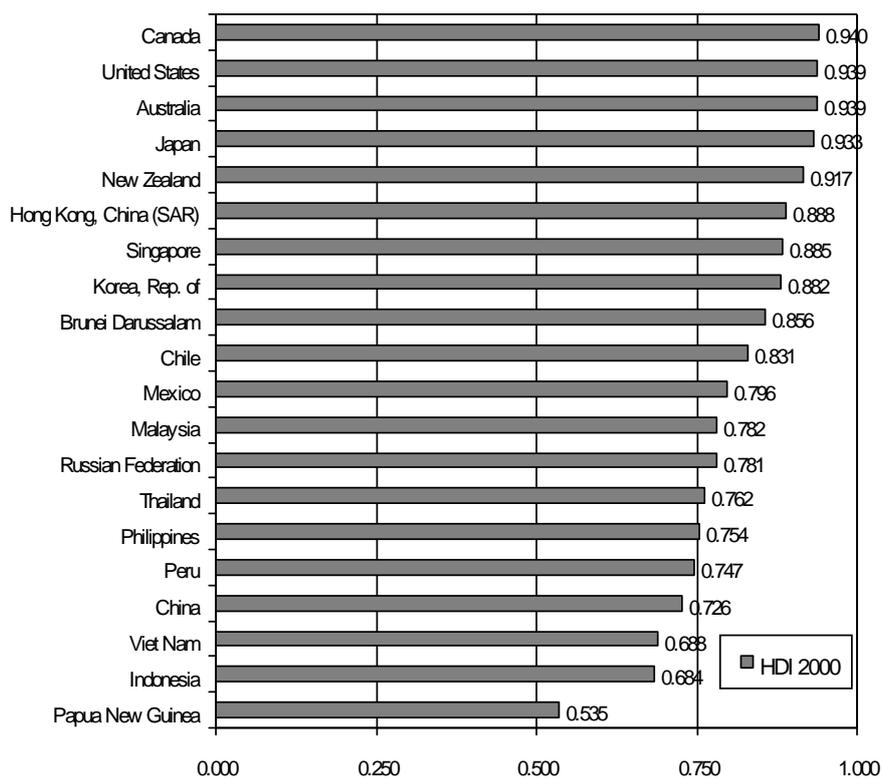
PENDAHULUAN

Wilayah Asia-Pasifik pada saat ini dianggap sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang idel di dunia. Peluang emas telah terbuka untuk memantapkan upaya pembangunan ekonomi memasuki abad ke-21 yang sering disebut-sebut sebagai abad Asia-Pasifik. Untuk mengusahakan realisasi atas ide ini telah terbentuk blok perdagangan Asia pasifik, APEC. APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) merupakan forum kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Tujuan jangka pendek APEC adalah untuk meningkatkan integrasi perekonomian antar sesama anggotanya melalui peningkatan perdagangan dan lalu lintas faktor produksi: modal dan tenaga kerja (termasuk teknologi). Tujuan jangka panjang APEC adalah untuk menciptakan perdagangan bebas di lingkungan masyarakat Asia Pasifik.

Salah satu hal yang masih menjadi halangan dalam menjamin keadilan perdagangan di wilayah Asia Pasifik adalah masalah sumber daya manusia.

Ketidakmeratan kemampuan sumber daya manusia di negara-negara Asia Pasifik menjadi kekhawatiran bagi negara-negara yang masih tertinggal di kawasan ini. Papua New Guinea, Vietnam dan maupun Indonesia merupakan negara yang perlu mencermati hal ini.

Indonesia dan Papua new Guinea merupakan negara dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa, jumlah penduduk yang besar, tetapi tidak ditunjang dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Pada tahun 2000, Indonesia memiliki penduduk sekitar 212,1 juta jiwa atau sekitar 8,36% dari seluruh populasi penduduk negara yang tergabung dalam APEC. Pada tahun yang sama, *Human Development Index* (HDI) Indonesia masih berada pada skala 0,684. pada skala ini, Indonesia menempati rangking kemampuan sumber daya manusia nomor urut ke 19, hanya Papua New Guinea dengan nilai HDI di bawah Indonesia. Gambar 3.1 menunjukkan komposisi HDI dari negara-negara yang tergabung dalam APEC



Sumber: UNDP, 2002, data diolah

Gambar 3.1: Human Development Index (HDI) di 20 negara APEC

Dari uraian pada latar belakang, kondisi di wilayah Asia Pasifik dapat diketahui sepiintas bahwa terdapat beberapa negara yang secara spesifik masih dipertanyakan kemampuannya untuk menuju era perdagangan bebas. Pasar bebas menuntut kemampuan pelaku ekonominya untuk saling bersaing. Kemampuan pengelolaan sumber daya ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia menjadi tema sentral apakah pasar bebas Asia Pasifik akan menjadi pasar yang adil bagi negara-negara anggotanya.

Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia di negara-negara anggota APEC.

METODE ANALISIS

Penelitian ini ditujukan untuk melihat deskripsi kondisi sosial ekonomi setiap negara di kawasan Asia Pasifik (spesifik di negara-negara terhimpun paa forum APEC), menguji berbagai variabel sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat pembangunan sumber daya manusia serta

melihat potensi SDM Indonesia di forum APEC sebagai kawasan perdagangan bebas.

Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka yang didukung dengan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Untuk analisis kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data cross-section pada satu periode waktu dengan metode regresi berganda dengan kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS).

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi;

1. *Human Development Index* negara-negara APEC sejak tahun 1975 sampai 2000
2. Data-data kependudukan Asia Pasifik,
3. Data spesifik untuk keperluan regresi; Produk Domestik bruto perkapita (dengan ukuran *Purchasing Power Parity*), populasi penduduk, populasi penduduk yang mendapat air layak, penduduk dewasa terkena HIV/AIDS, angka kematian Ibu melahirkan, anggaran pendidikan, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), jaringan telepon, anggaran riset dan pengembangan (*Research and Development*)

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sepenuhnya diperoleh dari publikasi The

United Nation Development Programmme (UNDP) yaitu Human Development Report tahun 2002. Observasi dilakukan terhadap seluruh populasi negara-negara kawasan Asia Pasifik. Dengan keterbatasan data tersedia, sampel yang ditentukan adalah sebanyak 20 sampel negara.

Untuk menghasilkan kebijakan pada masalah peningkatan sumber daya manusia, pertama, penelitian ini mencoba untuk memberikan deskripsi mengenai aspek geografi. Selanjutnya penelitian melihat dan membandingkan kondisi sosial ekonomi masyarakat antar negara Asia Pasifik. Kondisi sosial ekonomi ini meliputi aspek jumlah penduduk, tingkat ketergantungan penduduk (yaitu rasio penduduk bukan tenaga kerja dengan jumlah penduduk total), kondisi kesehatan penduduk dan ketersediaan sarana kesehatan, kemampuan akses penduduk pada sanitasi yang layak, perhatian pemerintah pada aspek pendidikan dan kesehatan masyarakat, aspek teknologi komunikasi dan riset pengembangan (R&D).

Teknik kalkulasi untuk HDI dan HPI adalah sebagai berikut. HDI merupakan ukuran mengenai pembangunan manusia yang diterapkan oleh The United Nations Development Programme (UNDP), sebuah badan dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus masalah pembangunan negara-negara di dunia. HDI mengukur rata-rata kemajuan di suatu negara yang meliputi 3 dimensi pembangunan manusia, yaitu (UNDP, 2002; 252-251);

1. Usia dan kesehatan, yang diukur dengan tingkat harapan hidup.
2. Tingkat pengetahuan, yang diukur dengan tingkat melek huruf dewasa (dengan bobot 2/3) dan dikombinasikan dengan rasio kesempatan menikmati pendidikan dasar dan menengah (dengan bobot 1/3).
3. Tingkat standar hidup, yang diukur dengan GDP per kapita (dengan ukuran *Purchasing Power Parity* dalam \$US).

Sebelum HDI dikalkulasi, sebuah Indeks diperlukan untuk menghasilkan ketiga dimensi tersebut. Untuk menghitung Indeks-Indeks dimensi ini (Indeks tingkat harapan hidup, pendidikan dan GDP) nilai minimum dan maksimum dipilih untuk setiap indikator tersebut.

Formula untuk setiap dimensi tersebut bernilai antara 0 – 1 dengan rumus;

Indeks Dimensi

$$= \frac{\text{Nilai aktual} - \text{Nilai minimum}}{\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}$$

Dengan demikian, HDI dihitung sebagai rata-rata dari indeks-Indeks dimensi.

HASIL ANALISIS

Saat dunia memasuki dasawarsa sembilan puluhan telah terjadi berbagai perkembangan baru. Perekonomian Amerika Serikat yang mengalami pasang naik sejak pertengahan dasawarsa delapan puluhan mulai agak mengendor. Sementara itu di Eropa yang di masa sebelumnya ekonomi mengalami perlambatan karena laju pertumbuhan yang lambat, pengangguran yang besar dan inflasi untuk beberapa negara yang sering mengkhawatirkan, dewasa ini seolah-olah Eropa menemukan kembali kepercayaan diri untuk menyatukan pasar di akhir 1992.

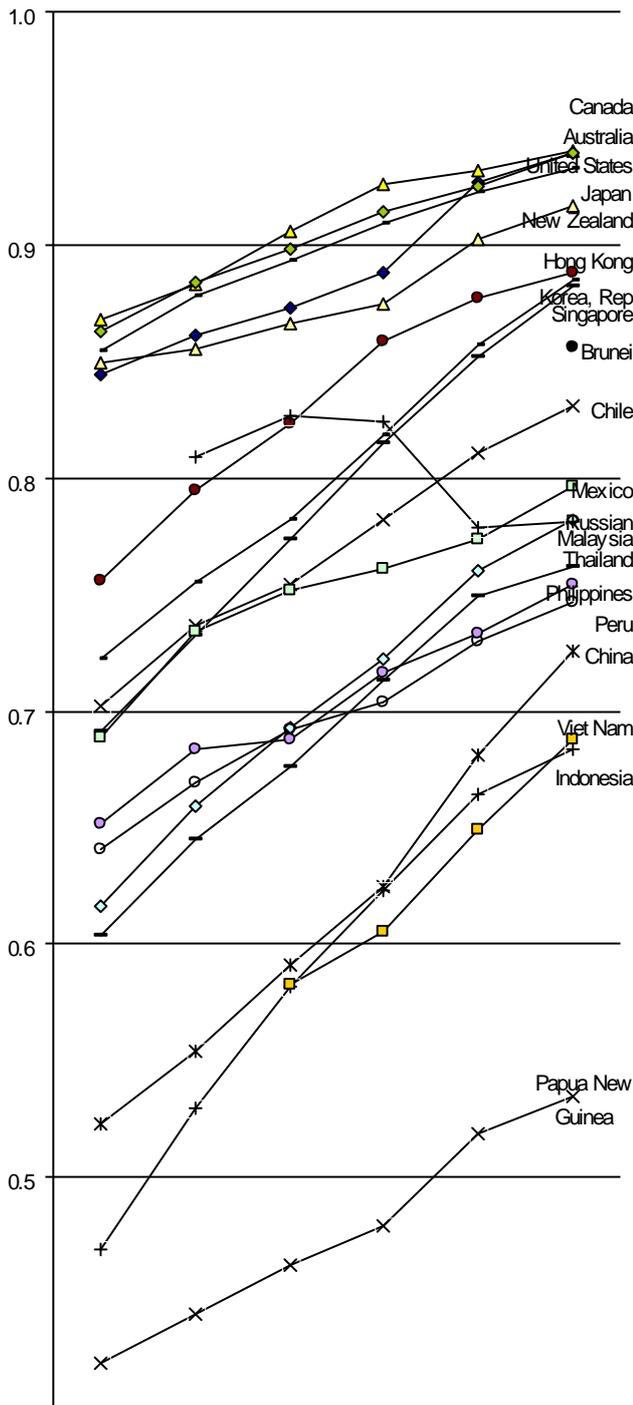
Dalam hal ini terjadi kecenderungan yang seolah-olah bertentangan satu sama lain. Di satu sisi terjadi proses globalisasi keuangan, investasi, dan produksi yang menyatukan dunia dalam hubungan interdependensi yang menguat. Di sisi lain, timbul gejala-gejala menguatnya dorongan untuk membentuk blok-blok perdagangan. MEE yang diresmikan tahun 1992, perjanjian perdagangan bebas Amerika-Kanada, maupun pembentukan kawasan perdagangan bebas di Asia Pasifik merupakan bentuk-bentuk pengelompokan kekuatan tersebut (Sudrajad, 1992; hal 25).

Secara geografis jika dihitung dalam luas area maupun akumulasi penduduknya, kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan dengan wilayah terluas dan terbanyak penduduknya. Kawasan ini meliputi 3 benua. Bahkan jumlah penduduk negara-negara yang tergabung dalam forum OPEC mencapai 1/3 penduduk dunia. Tidak semua negara-negara yang terdapat di kawasan ini bergabung dalam forum perdagangan bebas Asia Pasifik. Sampai akhir tahun 2005 tercatat hanya 21 negara saja yang menjadi anggotanya.

Perekonomian Asia Pasifik merupakan wilayah perkembangan ekonomi baru. Di dalamnya terdapat 6 negara maju (Amerika, Rusia, Kanada, Jepang, Australia dan New Zealand) serta negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang merupakan negara industri baru. Negara macan Asia ini antara lain Singapura, China, dan Republik Korea Selatan.

1. Perkembangan *Human Development Index (HDI)*

Sebagai besaran relatif, HDI dapat dipergunakan untuk melihat dan membandingkan se-bberapa besar hasil pembangunan sumber daya manusia antar negara.



Gambar 3.2. Perkembangan HDI 1975 - 2000

Di wilayah APEC, negara paling tertinggal dalam pembangunan sumber daya manusianya adalah Papua New Guinea. Kondisi negara ini masih sama selama kurun waktu 1975 – 2000. Gambar 3.2 memperlihatkan kondisi ini.

Pada umumnya, setiap negara di kawasan APEC memperlihatkan per-tumbuhan HDI secara positif. Untuk kasus Rusia, negara ini memperlihatkan nilai HDI yang fluktuatif. Penurunan nilai HDI yang tajam sejak 1990 di

Rusia dapat diakibatkan karena negara ini sebelumnya merupakan bagian dari negara USSR (United State Soviet Russia). Pada tahun itu, pemisahan dari negara-negara bagian di USSR memunculkan negara-negara baru yang diikuti dengan krisis jangka pendek.

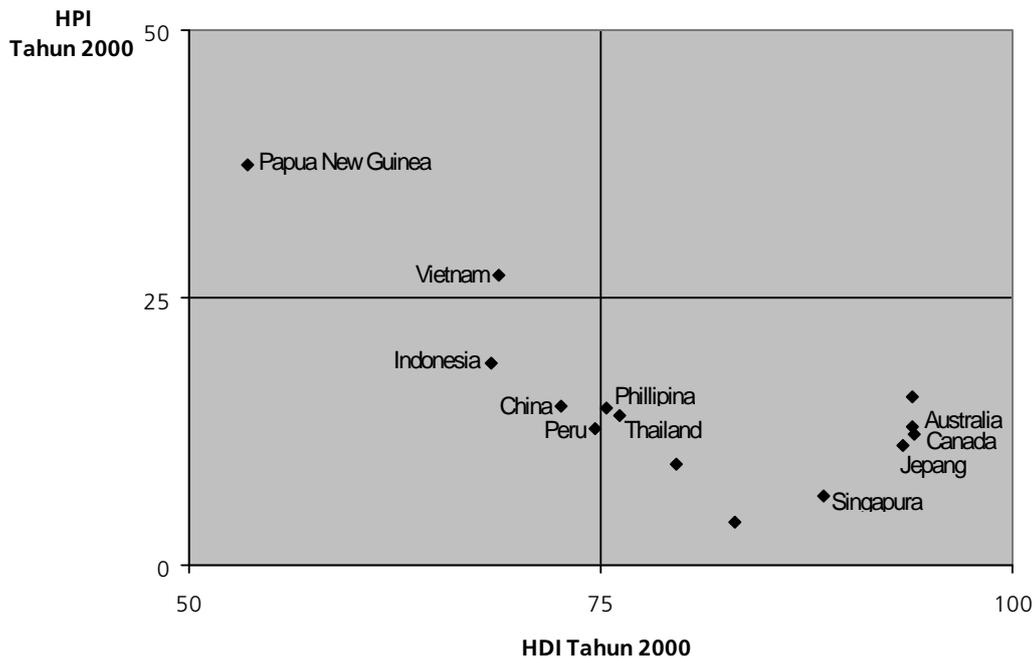
Dilihat dari trennya, Indonesia merupakan negara yang paling baik dalam perkembangan HDI sejak 1975. Tahun 1975, angka HDI Indonesia masih sebesar 0,469 dan pada tahun 2000 telah mencapai angka 0,684. Nilai HDI Indonesia dalam jangka waktu 25 tahun telah tumbuh sebesar 45,84%. China demikian pula. Angka HDI negara ini dalam jangka waktu 25 tahun tumbuh sekitar 38,61%.

Negara-negara maju di wilayah APEC pada tahun 2000 tetap memiliki kemampuan pembangunan sumber daya manusia lebih tinggi daripada negara-negara lain. Canada, Australia, Amerika, Jepang, New Zealand mendominasi nilai HDI tahun 2000. Sebaliknya, Vietnam Indonesia dan Papua New Guinea adalah tiga negara dengan HDI yang masih rendah di Asia Pasifik (kurang dari 0,70), bahkan untuk Papua New Guinea baru mencapai HDI sebesar 0,535.

Sebelum tahun 2000, HDI Vietnam masih di bawah HDI Indonesia. Tahun 2000, HDI Vietnam melampaui HDI Indonesia. Hal ini perlu menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia. Tahun 2000 untuk wilayah APEC, HDI Indonesia menduduki peringkat HDI terburuk nomor dua setelah Papua New Guinea. Rendahnya nilai HDI ini menyiratkan pertanyaan atas kesiapan sumber daya manusia Indonesia untuk menuju perdagangan bebas dunia.

Pada sisi angka kemiskinan, Vietnam dan Papua New Guinea merupakan negara dengan angka kemiskinan lebih tinggi daripada negara Asia Pasifik lainnya. Ukuran yang digunakan adalah nilai *Human Poverty index* (HPI). Berlawanan dengan konsep HPI, semakin tinggi nilai HPI berarti tingkat kemiskinan masyarakat semakin tinggi, dan sebaliknya. HPI Papua New Guinea diketahui sebesar 0,375 dan Vietnam sebesar 0,271. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan Singapura (0,065) atau Jepang (0,112). Gambar 25 menunjukkan hal ini.

Gambar 3.3 mampu menunjukkan pula terdapat keterkaitan negatif antara HPI dengan HDI. Semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu negara mencerminkan rendahnya kualitas pembangunan SDMnya, dan sebaliknya. Indonesia termasuk dalam skala HPI relatif tinggi dan HDI relatif rendah. Hampir sama dengan realitas Indonesia adalah Peru dan China. Tetapi dibandingkan dengan keduanya, Indonesia relatif kurang baik posisi HDI maupun HPI-nya.



Gambar 3.3. HDI dan HPI kawasan Asia Pasifik – Tahun 2000

Tabel 3.1. Regresi pada variabel tergantung HDI

| | Beta | Std.Error | B | Std.Err. | t-stat | p-level |
|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| Intercept | | | 0,7222 | 0,1710 | 4,2249 | 0,0134 |
| PDBPerkap | 0,6746 | 0,0615 | 0,0056 | 0,0005 | 10,9660 | 0,0004 |
| Populasi | -3,7108 | 1,1279 | -0,0536 | 0,0163 | -3,2900 | 0,0302 |
| %Air | 0,6080 | 0,0849 | 0,0037 | 0,0005 | 7,1573 | 0,0020 |
| %HIVDws | -0,4143 | 0,0800 | -0,0086 | 0,0017 | -5,1808 | 0,0066 |
| Morlbu | -0,1638 | 0,0443 | -0,0001 | 0,0000 | -3,7005 | 0,0208 |
| %EduPub | 4,2683 | 1,1958 | 0,0672 | 0,0188 | 3,5695 | 0,0234 |
| Perub-IHK | -0,4659 | 0,0850 | -0,0073 | 0,0013 | -5,4787 | 0,0054 |

Adj R² = 0,9870

F(7,4) = 117,91 p < 0,00018 Std.Error of estimate (SEE) = 9,2621

Dimana ;

PDBPerkap = Produk Domestik Bruto per Kapita (PPP US\$)

Populasi = Jumlah populasi penduduk (juta)

%Air = Persentase penduduk mendapatkan sumber air layak

%HIVDws = Persentase penduduk kena HIV/AIDS

Morlbu = Kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran

%EduPub = Persentase Pengeluaran sektor publik untuk pendidikan

Perub-IHK = Rata-rata perubahan tahunan indeks harga konsumen

2. Analisis Regresi: Faktor Sosial Ekonomi yang mempengaruhi Pembangunan Sumber Daya Manusia

Model ekonometrik ditunjukkan pada tabel 3.1. Hasil persamaan regresi menunjukkan secara statistik pada $\alpha = 5\%$, seluruh variabel tak tergantung berpengaruh signifikan terhadap variabel

tergantung HDI. Nilai F menunjukkan secara statistik seluruh variabel secara bersama-sama memiliki makna pada perubahan HDI. Tingginya nilai adj R² sebesar 0,987 memberikan indikator bahwa hanya terdapat sekitar 1,3% saja variabel yang tidak mampu dijelaskan oleh model.

Tanda + dan - pada B atau parameter setiap variabel memiliki makna yang jelas. PDB

per kapita, akses pada air bersih dan pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh positif pada HDI. Semakin tinggi nilai ketiga variabel ini akan meningkatkan nilai HDI. Sebaliknya populasi penduduk total, penduduk kena HIV/AIDS, mortalitas ibu melahirkan dan perubahan indeks harga (inflasi) berpengaruh negatif pada HDI. Semakin tinggi nilai keempat variabel ini akan mengakibatkan nilai HDI semakin rendah.

HDI dan PDB per kapita memiliki korelasi yang positif. Semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat suatu negara semakin tinggi pula tingkat pembangunan sumber daya manusia di negara tersebut. Amerika Serikat, Canada, Jepang dan Australia merupakan contoh negara dengan pendapatan perkapita tinggi dan nilai HDI negara-negara tersebut juga tinggi. Papua New Guinea dan Indonesia merupakan contoh negara dengan

pendapatan per kapita masyarakat yang rendah dan rendah pula HDI negara-negara ini.

3. Realitas Kemampuan Sumber Daya Manusia Relatif Indonesia

Ide perdagangan bebas memang menarik dari sisi teoritis. Namun realitas seringkali dapat menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan bebas dalam kenyataannya didominasi oleh politik kepentingan khusus daripada pertimbangan-pertimbangan biaya dan manfaat nasional. Bagi Indonesia, untuk memasuki pasar bebas perlu dilakukan kebijaksanaan yang secara praktis membawa manfaat bagi kepentingan nasional. Diantaranya adalah bagaimana mengusahakan sektor ekonomi dalam negeri dapat bertahan dan bersaing menghadapi persaingan dengan luar negeri dari akibat adanya pasar bebas.

Tabel 3.3. Realitas Beberapa Aspek Sumber Daya Manusia Indonesia

| Faktor | Realitas | Peringkat se APEC |
|--|--|---|
| Kondisi Ekonomi | 1. PDB Per kapita Indonesia hanya sebesar 3.408 US\$ tahun 2000. | Tertinggi nomor 18 dari 20 negara APEC |
| | 2. Tingkat pertumbuhan PDB per kapita tahunan sebesar 2,5% (dari 1990-2000) | Tertinggi nomor 10 dari 20 negara APEC |
| Kondisi Kependudukan | 3. Rata-rata pertumbuhan populasi penduduk tahunan (dari 1975-2000) sebesar 1,80% tahun 2000 | Tertinggi nomor 12 dari 20 negara APEC |
| | 4. Populasi penduduk umur muda (kurang dari 15 tahun) sebesar 30% dari total populasi tahun 2000 | Terendah nomor 13 dari 20 negara APEC |
| | 5. Populasi penduduk umur tua (lebih dari 64 tahun) sebesar 4,8% dari total populasi tahun 2000 | Tertinggi nomor 14 dari 20 negara APEC. |
| | 6. Rata-rata umum harapan hidup hanya sebesar 66,2 tahun tahun 2000 | Tertinggi nomor 18 dari 20 negara APEC |
| | 7. Populasi Urban sebesar 41% dari total penduduk tahun 2000 | Tertinggi nomor 16 dari 20 negara APEC |
| Kondisi Kesehatan Masyarakat | 8. 66% penduduk memperoleh kecukupan sanitasi tahun 2000 | Tertinggi nomor 12 dari 14 negara APEC |
| | 9. 76% penduduk memperoleh kecukupan air bersih dan layak tahun 2000 | Tertinggi nomor 12 dari 15 negara APEC |
| | 10. Pengeluaran kesehatan sektor publik sebesar 0,8% dari PDB tahun 1999 | Tertinggi nomor 16 dari 17 negara APEC |
| | 11. Pengeluaran kesehatan sektor privat sebesar 0,9% dari PDB tahun 1999 | Tertinggi nomor 17 dari 18 negara APEC |
| | 12. Pengeluaran kesehatan per kapita sebesar 8 US\$ tahun 1999 | Tertinggi nomor 17 dari 17 negara APEC |
| | 13. 30 bayi meninggal dari setiap 1.000 kelahiran tahun 2000 | Terendah nomor 17 dari 19 negara APEC |
| | 14. 380 ibu melahirkan meninggal dari setiap 100.000 ibu melahirkan tahun 2000 | Terendah nomor 16 dari 16 negara APEC |
| 15. Estimasi sekitar 0,1% penduduk dewasa terkena HIV/AIDS | Terendah nomor 4 dari 19 negara APEC | |
| Pendidikan dan Teknologi | 16. 86,9% penduduk melek huruf | Tertinggi nomor 13 dari 15 negara APEC |
| | 17. Pengeluaran untuk R&D sebesar 0,1% dari PDB | Tertinggi nomor 14 dari 15 negara APEC |
| | 18. Setiap 1000 penduduk terdapat 31 jaringan telepon | Terbesar nomor 19 dari 20 negara APEC |

Kenyataan bahwa kesenjangan ekonomi dan kemampuan sumber daya manusia terjadi di negara-negara Asia Pasifik. Hal ini menimbulkan pertanyaan secara khusus bagi Indonesia "apakah negara ini telah benar-benar siap untuk bersaing dengan sumber daya asing?". Dari paparan analisis di muka, terdapat beberapa hal yang perlu disimak untuk melihat realitas Indonesia Tabel 3.3 memperlihatkan realitas ini.

Jika ditinjau dari ukuran HDI dan HPI, Indonesia termasuk negara yang kapasitas pembangunan sumber daya manusianya relatif rendah disertai tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dari negara-negara APEC lainnya. Hal ini ditunjang dengan realitas rendahnya PDB perkapita, rendahnya tingkat harapan hidup, tingginya golongan penduduk usia muda (kurang dari 15 tahun) yang merupakan usia ketergantungan, rendahnya perhatian negara dan masyarakat terhadap aspek kesehatan, tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan, masih tingginya tingkat buta huruf (sebagai kebalikan dari rendahnya tingkat melek huruf), maupun faktor upaya memajukan teknologi yang masih tertinggal.

KESIMPULAN

Aspek ekonomi, kependudukan, kesehatan masyarakat maupun pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pembangunan sumber daya manusia di kawasan APEC. Variabel Produk Domestik Bruto per kapita, akses pada air bersih dan pengeluaran sektor pendidikan berpengaruh positif pada HDI. Semakin tinggi nilai ketiga variabel ini akan meningkatkan nilai HDI. Sebaliknya variabel populasi penduduk total, penduduk kena HIV/AIDS, mortalitas ibu melahirkan dan perubahan indeks harga (inflasi) berpengaruh negatif pada HDI. Semakin tinggi nilai keempat variabel terakhir ini akan mengakibatkan nilai HDI semakin rendah.

APEC bagi Indonesia di satu sisi memberikan peluang prospek yang bagus dalam upaya meningkatkan manfaat hubungan perdagangan antar negara dan sekaligus pula prospek meningkatkan peran Indonesia dalam dunia Internasional. Di sisi lain, APEC memberikan berbagai dampak yang kurang menguntungkan karena faktor-faktor yang tidak mendukung seperti lemahnya kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Rekomendasi yang disampaikan adalah;

1. Kenyataan bahwa sektor pendidikan memberikan andil besar bagi kemampuan sumber daya manusia, negara perlu memberikan porsi anggaran yang lebih besar kepada sektor ini. Termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk mendidik masyarakat mengenal dan mempelajari teknologi yang lebih baik.

2. Masih tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan menunjukkan bahwa aspek kesehatan masyarakat belum dijadikan tolak ukur kesuksesan pembangunan SDM di negara ini. Pembangunan secara mutlak di sektor pelayanan kesehatan perlu menjadi pertimbangan utama sebagaimana upaya ini juga telah mengantarkan negara-negara maju dan negara industri baru dapat meraih proses pembangunan yang lebih baik.
3. Pemerintah perlu melaksanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih berwawasan lingkungan. Hal ini terkait dengan upaya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat khususnya lingkungan sanitasi yang layak untuk tempat hunian dan ketersediaan air bersih yang mencukupi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2003. *Human Development Report 2003; Millenium Development Goals: A Compact Among Nations To End Human Poverty*. The United Nations Development Programme (UNDP). New York.
- _____. 2002. *Human Development Report 2002, Deepening Democracy in a fragmented World*. The United Nations Development Programme (UNDP). New York
- _____. 2001. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. World bank & Oxford University Press. Washington DC
- Anwar Nasution. 1994. *APEC: Tantangan dan Dampaknya pada Ekonomi Indonesia*, tulisan untuk majalah Bank & Pembangunan Edisi September/Oktober 1994. PT Bank Negara Indonesia (persero). Jakarta
- Djiwandono, J, Soedrajad. 1992. *Perdagangan dan Pembangunan: Tantangan, Peluang dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia*. LP3ES. Jakarta
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. International Edition. McGraw-Hill
- Habibie, BJ. 2004. *Beberapa Pemikiran Tentang Peran Sumberdaya Manusia Dalam Membangun Bangsa*, makalah disampaikan di hadapan Guru Besar, Dosen dan Mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 10 Februari 2004